

## Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi ESDM Provinsi Papua Tengah

Sisilia Limbong Panennen<sup>1\*</sup>, Sita Yubelina Sabandar<sup>2</sup>, Yoel Pasae<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

[sisilialimbongpanennen@gmail.com](mailto:sisilialimbongpanennen@gmail.com)<sup>1\*</sup>

\*Penulis korespondensi

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan kunci dari pihak internal dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan telah diterapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban berbasis regulasi, namun masih terdapat keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan yang berorientasi pada kinerja. Sementara itu, transparansi sudah diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, meskipun aksesibilitas data belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung implementasi akuntabilitas dan transparansi meliputi regulasi pemerintah, komitmen pimpinan, serta dukungan sumber daya manusia, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan kapasitas aparatur, kendala teknis sistem informasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan peran pengawasan untuk mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih baik.

**Kata kunci:** akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan, tata kelola publik, Papua Tengah

### Abstract

*This study aims to analyze accountability and transparency in financial management at the Department of Manpower, Transmigration, and Energy and Mineral Resources of Central Papua Province. A descriptive qualitative approach was employed using interviews, observations, and documentation, with key informants from within the institution. The findings reveal that financial accountability has been implemented through regulatory-based reporting mechanisms; however, limitations remain in producing performance-oriented financial reports. Transparency has been demonstrated through public disclosure of information, yet data accessibility for stakeholders is still not fully optimized. Supporting factors include government regulations, leadership commitment, and human resource involvement, while inhibiting factors consist of limited staff capacity, technical challenges in information systems, and the public's low level of understanding of financial reporting. These results highlight the urgency of strengthening staff capacity, optimizing information systems, and reinforcing supervisory roles to enhance financial governance and foster greater public trust.*

**Keywords:** *accountability, transparency, financial management, public governance, Central Papua*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik yang berperan penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan anggaran (Parindingan & Haliah, 2022; Natawibawa et al., 2022). Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas (BPK, 2024; Pratiwi et al., 2022).

Meskipun regulasi keuangan daerah telah berkembang, praktik akuntabilitas dan transparansi di level pemerintah daerah masih menghadapi tantangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya efektif menekan praktik korupsi karena lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan (Wardoyo & Jatmiko, 2023). Kondisi ini juga tercermin di berbagai daerah, termasuk Papua Tengah, yang memiliki kompleksitas dalam tata kelola, baik dari sisi kapasitas aparatur, infrastruktur, maupun karakteristik sosial ekonomi wilayah.

**Tabel 1.** Fenomena dan Data Pendukung

Indikator	Data / Fakta
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas	BPK (2024) menekankan bahwa kedua prinsip ini adalah pilar utama pengelolaan keuangan negara.
Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Parindingan & Haliah, 2022).
Risiko Korupsi	Desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menekan tingkat korupsi; akuntabilitas masih menjadi kelemahan (Wardoyo & Jatmiko, 2023).
Perguruan Tinggi sebagai Studi Perbandingan	Transparansi dan akuntabilitas terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan institusi publik (Natawibawa et al., 2022).

Sumber: Dari berbagai sumber (2025)

Melihat peran strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Tengah dalam pengelolaan sumber daya manusia dan alam, penerapan akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat krusial. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparatur, minimnya akses

informasi publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan evaluasi empiris mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi dijalankan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis guna memperkuat tata kelola keuangan publik di daerah.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Provinsi Papua Tengah?
2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Provinsi Papua Tengah?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di instansi tersebut?

## TINJAUAN LITERATUR

### Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku (Musfirah, 2021). Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas mencakup empat dimensi utama: akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Rahman et al., 2019). Implementasi akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi untuk memastikan kejujuran, menghindari penyalahgunaan jabatan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Budiardjo, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas berhubungan erat dengan efektivitas tata kelola keuangan daerah (Paembonan et al., 2024; Sabandar et al., 2022). Kelemahan dalam dokumentasi, pengawasan, maupun kapasitas sumber daya manusia sering menjadi hambatan dalam penerapannya (Parindingan & Haliah, 2022). Oleh karena itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban berbasis regulasi dan audit internal menjadi

instrumen penting dalam membangun tata kelola yang akuntabel (Halik et al., 2024).

### **Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan, dapat diakses, dan dapat dipahami publik (Permendagri No. 20/2018). Transparansi berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja institusi (Abdul, 2019).

Menurut Suwarsih (2022), transparansi dapat diukur dari adanya mekanisme keterbukaan, aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen anggaran, laporan independen yang efektif, serta keterlibatan masyarakat. Dalam era digital, transparansi semakin dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses publik terhadap laporan keuangan (Natawibawa et al., 2022). Namun, hambatan berupa keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi keuangan masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya (Wardoyo & Jatmiko, 2023).

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan (PP No. 58/2005). Prinsip utama yang harus dijalankan adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Mulyani et al., 2022).

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan daerah yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik (Supriyadi, 2022). Namun, lemahnya sistem pengawasan dan kapasitas aparatur seringkali menjadi faktor penghambat (Parindingan & Haliah, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem pelaporan keuangan berbasis digital, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

### **Akuntabilitas, Transparansi, dan Good Governance**

Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen inti dari *good governance* yang menjadi standar tata kelola pemerintahan modern (World Bank, 2017). Keduanya berfungsi memperkuat legitimasi pemerintah,

meningkatkan kualitas layanan publik, serta mencegah praktik korupsi (Pratiwi et al., 2022).

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, penerapan *good governance* tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengawasan (Wardoyo & Jatmiko, 2023). Oleh sebab itu, integrasi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik menjadi syarat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di Indonesia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, persepsi, dan praktik yang dijalankan oleh aparatur pemerintah secara mendalam, sesuai konteks sosial dan institusionalnya (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini relevan digunakan dalam kajian tata kelola keuangan publik karena mampu menjelaskan kompleksitas fenomena yang tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif (Sugiyono, 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah. Karena penelitian bersifat kualitatif, maka tidak digunakan teknik sampling probabilistik, melainkan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti (Etikan & Bala, 2017). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari lima informan, yang meliputi tiga orang pegawai dinas yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan serta dua orang perwakilan masyarakat sebagai pihak eksternal yang berinteraksi dengan instansi terkait.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah, khususnya pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM sebagai objek utama. Lokasi penelitian dipilih karena instansi ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya manusia dan alam di daerah yang memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan geografis. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2025, yang

mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, serta verifikasi data lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik pengelolaan keuangan, sementara wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi dari informan mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, laporan keuangan, serta dokumen resmi terkait kebijakan keuangan daerah. Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta tema utama yang muncul dari hasil penelitian (Creswell & Poth, 2018). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di instansi pemerintah daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Responden penelitian ini terdiri atas lima orang informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Tiga di antaranya merupakan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, sementara dua lainnya berasal dari masyarakat yang berinteraksi langsung dengan program-program dinas. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif baik dari sisi internal (aparatur) maupun eksternal (masyarakat).

Secara demografis, tiga pegawai yang diwawancarai memiliki pengalaman kerja antara 5 hingga 15 tahun di bidang pengelolaan keuangan dan program dinas, dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana. Sementara itu, dua responden masyarakat adalah tokoh komunitas lokal yang memahami dinamika

pengelolaan anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Karakteristik ini mendukung keberagaman perspektif dalam melihat praktik akuntabilitas dan transparansi di institusi pemerintah daerah.

### Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan sudah berjalan sesuai regulasi, namun belum sepenuhnya optimal. Salah satu pegawai menyatakan:

*“Kami selalu berusaha menyusun laporan anggaran sesuai aturan, tetapi masih ada kendala pada kelengkapan dokumentasi yang kadang menghambat proses evaluasi.”* (Informan 1, Pegawai Dinas)

Pengawasan internal dilakukan secara periodik melalui audit internal setiap enam bulan sekali. Namun, keterbatasan jumlah dan kapasitas personel menjadi hambatan signifikan dalam memastikan efektivitas pengendalian. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa akuntabilitas publik sering melemah akibat keterbatasan sumber daya manusia (Parindingan & Haliah, 2022).

### Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan

Dari sisi transparansi, Dinas telah berupaya membuka akses publik terhadap laporan keuangan melalui forum musyawarah dan penyampaian laporan secara manual. Namun, publikasi informasi keuangan secara digital masih terbatas. Salah satu masyarakat menyebutkan:

*“Kami pernah diajak sosialisasi anggaran, tetapi tidak ada akses online untuk mengecek bagaimana uang itu dipakai.”* (Informan 4, Tokoh Masyarakat)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk keterbukaan, aksesibilitas informasi bagi masyarakat masih rendah. Kondisi ini konsisten dengan temuan Natawibawa et al. (2022) yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital sangat berpengaruh terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan publik.

### Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung penerapan akuntabilitas dan transparansi di dinas ini antara lain adanya

regulasi pemerintah daerah, komitmen pimpinan untuk menegakkan tata kelola, serta keterlibatan aparatur dalam penyusunan laporan. Namun, faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM, kendala teknis pada sistem informasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Provinsi Papua Tengah telah diterapkan namun belum maksimal. Akuntabilitas terbukti masih menghadapi masalah dokumentasi dan keterbatasan pengawasan, sedangkan transparansi menghadapi hambatan pada aksesibilitas informasi publik.

Temuan ini menegaskan teori *good governance* yang menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua pilar utama tata kelola keuangan publik (World Bank, 2017). Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi serta minimnya kapasitas SDM menjadi faktor penghambat dominan, sebagaimana juga diidentifikasi oleh Wardoyo dan Jatmiko (2023).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan keuangan, optimalisasi sistem informasi berbasis digital untuk publikasi laporan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat ditegakkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah telah berjalan sesuai dengan regulasi, tetapi belum optimal. Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pelaporan dan audit internal, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dokumentasi dan kapasitas sumber daya manusia. Transparansi juga sudah diupayakan melalui forum musyawarah serta penyampaian informasi keuangan, namun aksesibilitas data publik, khususnya berbasis digital, masih terbatas.

Faktor pendukung implementasi akuntabilitas dan transparansi meliputi adanya regulasi pemerintah daerah, komitmen pimpinan, serta keterlibatan aparatur dalam proses pelaporan. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup keterbatasan kapasitas aparatur, kendala teknis sistem informasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik di tingkat daerah.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan khusus di bidang pengelolaan keuangan dan teknologi informasi. Kedua, pemanfaatan sistem informasi berbasis digital harus dioptimalkan agar publik dapat mengakses laporan keuangan secara mudah, cepat, dan transparan. Ketiga, diperlukan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pengawasan anggaran melalui forum publik, sosialisasi, maupun media daring. Keempat, penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dijalankan secara konsisten.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Provinsi Papua Tengah tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2019). Transparansi pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 120–135.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, November 26). *BPK highlights the importance of transparency and accountability in state financial management*. BPK RI.
- Budiardjo, M. (2020). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative*

- inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 215–217. <https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>
- Halik, M. Y., Halik, J. B., Sumanti, D. A. F., & Mangampa, S. N. M. (2024). Auditor's Individual Morality In Moderating The Love Of Money And Machiavellian Characteristics Of Accounting Fraud Tendencies. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2889–2903. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i11.p11>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mulyani, F., Nurhayati, & Ridwan. (2022). Pengelolaan keuangan daerah berbasis good governance. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(2), 55–68.
- Musfirah. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 33–46.
- Natawibawa, I. W. Y., Mulya, I. M. O., & Yoh, W. H. (2022). Transparency and accountability as determinants in the financial management of universities: A study on state universities in Malang City. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.247>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Paranoan, N., Sabandar, S. Y., Paranoan, A., Pali, E., & Pasulu, I. (2022). The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia. *WSEAS Transactions on Information Science and Applications*, 19, 54–62. <https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.6>
- Parindingan, F. Y., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Evaluation of transparency and accountability of regional government financial reports in the digitalization era. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 106–118. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1066>
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108–119. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Pratiwi, A., Hali, R., & Kusumawati, D. (2022). Public accountability and financial reporting practices in local governments. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(2), 101–113.
- Rahman, A., Fitria, & Santosa, H. (2019). Dimensi akuntabilitas publik dalam sektor pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 77–89.
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2022). Pengawasan pengelolaan keuangan daerah: Sebuah kajian empiris. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 66–80.

- Suwarsih, S. (2022). Indikator transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(3), 45–59.
- Wardoyo, D. U., & Jatmiko, A. H. (2023). The influence of fiscal decentralization, accountability, and financial performance on the level of corruption in Indonesian provincial governments. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 3(4), 511–523. <https://doi.org/10.29210/020244441>
- World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank.